

Permasalahan Pendidikan Kabupaten Sleman

Pengantar

Berbicara tentang permasalahan pendidikan Sleman, berarti berbicara diri kita, potret pendidikan yang ada di Sleman. Jika diidentifikasi secara luas, permasalahan pendidikan Sleman akan ada “seabrek” warna diri, akan tetapi dalam kertas kerja ini selaku anggota dewan pendidikan yang baru bertugas selama setahun, penulis mencermati beberapa permasalahan pendidikan di Sleman yang dapat diukur secara kuantitatif dan dapat dianalisis setidaknya ada tiga teramsuk yang secara aktual sedang dihadapi dalam kaitannya dengan kondisi “covid”: a) Permasalahan pendidikan berdasarkan indikator kinerja, b) Permasalahan Pendidikan Berdasarkan Pada Aspek Pelayanan Pendidikan, dan yang ketiga adalah c) Permasalahan pendidikan pada era covid. Permasalahan pendidikan di Sleman disarikan dari data yang ada di *Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan Hasil penelitian Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2020.*

Permasalahan Pendidikan Berdasarkan Indikator Kinerja

Berdasarkan data yang ada dapat diidentifikasi permasalahan pendidikan di Sleman dilihat dari beberapa indikator kinerja pendidikan adalah dengan indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka rata-rata lama sekolah, dan angka harapan lama sekolah, sebagai berikut.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan APK pada pendidikan dasar di Kabupaten disajikan pada Gambar 1. Angka partisipasi kasar sekolah SD/MI dan SMP/MTs selama tahun tersebut menunjukkan angka di atas 100%. Angka partisipasi kasar bisa mencapai lebih dari 100% menunjukkan bahwa jumlah murid pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SD/MI dan penduduk usia SMP/MTs.

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021

Gambar 1. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Hal tersebut dapat terjadi, antara lain karena adanya penduduk usia prasekolah SD sudah menjadi murid SD karena masih terdapat daya tampung sekolah; adanya penduduk usia di atas 12 tahun yang masih bersekolah jenjang SD/MI karena terlambat masuk SD/MI atau karena pernah tinggal kelas; serta adanya murid bukan penduduk Kabupaten Sleman yang bersekolah di wilayah Kabupaten Sleman. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, APK SD/MI dan APK SMP/MTs turun dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh adanya regulasi pemerintah tentang zonasi sekolah bagi sekolah negeri baik jenjang SD, SMP maupun SMA, serta batasan usia masuk sekolah SD Negeri adalah 7 tahun.

Tabel 1. APK SD dan APK SMP Menurut Kapanewon Tahun 2019

No	Kapanewon	APK SD			APK SMP		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Gamping	102,38	95,96	96,05	97,07	95,01	96,06
2	Godean	95,83	98,03	96,45	92,4	108,64	100,27
3	Moyudan	100,63	96,75	96,06	151,4	156,14	153,68
4	Minggir	84,39	85,48	83,27	119,94	126,59	123,09
5	Seyegan	92,85	89,59	90,52	77,98	70,84	74,49
6	Mlati	94,87	94,22	94,18	100,19	97,08	98,69
7	Depok	115,14	114,7	113,16	107,05	100,96	104,09
8	Berbah	93,44	82,91	111,94	78,29	90,75	84,38
9	Prambanan	116,37	109,03	112,1	168,83	182,27	175,53
10	Kalasan	100,94	101,42	100,19	82,35	86,71	84,37
11	Ngemplak	94,29	90,53	92,31	96,4	96,2	96,31
12	Ngaglik	93,79	93,14	91,01	112,66	119,23	115,82
13	Sleman	118,92	115,78	116,77	125,17	122,68	123,96
14	Tempel	101,02	96,74	97,6	110,26	107,77	109,06
15	Turi	93,93	91,67	91,9	113,99	101,68	108,04
16	Pakem	108,4	104,82	104,71	179,02	167,3	173,15
17	Cangkringan	94,28	91,3	92,82	71,45	61,3	66,54
Kabupaten Sleman		101,37	98,83	100,04	107,38	108,5	107,92

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021

Meskipun pada tingkat kabupaten, APK SD tahun 2019 telah mencapai lebih dari 100%, namun berdasarkan Tabel 2.18, kapanewon yang mempunyai APK SD lebih tinggi dari APK SD Kabupaten Sleman hanya 6 (enam) kapanewon, sedangkan 11 (sebelas) kapanewon lainnya masih di bawah angka kabupaten. APK SD paling rendah terjadi di Kapanewon Minggir (83,27%). Hal ini berarti dari 100 orang usia 7- 12 tahun, yang sedang bersekolah SD sebanyak 83 orang, sedangkan 17 orang lainnya tidak bersekolah.

Kondisi pada jenjang SMP, sedikit lebih baik. APK SMP Kabupaten Sleman mencapai 107,92%, yang berarti secara umum penduduk usia 13-15 tahun telah menyelesaikan sekolah lanjutan pertama. Kapanewon dengan APK SMP berada di bawah APK SMP kabupaten adalah Kapanewon Cangkringan (66,54%), Kapanewon Seyegan (74,49%), Kapanewon Kalasan (84,37%), Kapanewon Berbah (84,38), Kapanewon Gamping (96,06%), Kapanewon Ngemplak (96,31%) dan Kapanewon Mlati (98,69%).

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah angka perbandingan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dinyatakan dalam persen. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Pada tahun 2016-2020, angka partisipasi murni jenjang SD/MI masih diatas angka 100%. Angka itu menunjukkan bahwa kapasitas atau daya tampung sekolah SD di Kabupaten Sleman telah dapat mencukupi kebutuhan. Selain itu, angka tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SD/MI. Hal ini dapat terjadi karena terdapat anak luar daerah yang bersekolah di Kabupaten Sleman.

Gambar 2. Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah SD/MI
dan SMP/MTs Kab. Sleman 2016 - 2020

Peraturan zonasi sekolah yang telah diberlakukan, memberikan dampak terhadap turunnya APM SD pada tahun 2020. Angka APM kurang dari 100%, berarti terdapat anak usia SD yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Sleman atau ada anak usia SD yang tidak bersekolah. Anak usia SD yang tidak bersekolah bisa dimungkinkan karena: anak yang difabel, yang tidak bisa sekolah melalui sekolah formal; anak usia sekolah bersekolahnya dengan cara *home schooling*, anak *drop out* sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut penyebab APM SD/MI belum mencapai 100%, agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk menangani gap yang ada.

Pada jenjang SMP/MTs, selama kurun waktu tahun 2016-2020, APM SMP/MTs terdapat yang meningkat. Angka APM SMP/MTs tidak setinggi angka APM SD/MI dan belum mencapai 100% dikarenakan terdapat penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Sleman dan terdapat penduduk usia SMP/MTs yang menempuh pendidikan menengah.

3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 adalah 10,91 tahun, lebih tinggi dari RLS DIY yang sebesar 9,55 tahun.

4. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh

anak umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka harapan lama sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat

digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Sleman sebesar 16,73 tahun. HLS Kabupaten Sleman lebih tinggi daripada HLS DIY yang mencapai 15,59. HLS Kabupaten Sleman tidak terjadi merata di semua kapanewon. Berdasarkan data Bappeda DIY tahun 2018, HLS tertinggi terdapat di Kapanewon Depok, mencapai 18 tahun, sedangkan HLS terendah terjadi di Kapanewon Cangkringan sebesar 13,66 tahun. Angka HLS ini dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, PDRB per kapita serta rasio fasilitas pendidikan per 10.000 penduduk.

Tabel 2. Jumlah Sekolah per Jenjang Menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2020

No	Kapanewon	Jumlah Padukuhan	Jenjang Sekolah				
			SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	PT
1	Gamping	59	39	7	2	4	3
2	Godean	77	32	9	2	2	-
3	Moyudan	65	22	5	1	3	-
4	Minggir	68	24	4	1	1	1
5	Seyegan	67	29	4	1	4	-
6	Mlati	74	42	12	8	3	2
7	Depok	58	53	14	8	9	3
8	Berbah	58	24	6	1	3	1
9	Prambanan	68	29	9	5	2	-
10	Kalasan	80	36	7	3	3	1
11	Ngemplak	82	27	6	3	2	1
12	Ngaglik	87	44	9	2	3	3
13	Sleman	83	40	10	4	4	-
14	Tempel	98	34	6	3	5	-
15	Turi	54	23	6	1	3	-
16	Pakem	61	28	8	5	4	-
17	Cangkringan	73	21	4	2	2	1
Jumlah		1.212	547	126	52	57	16

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman 2021

5. Nilai Rata-rata Hasil Ujian

Hasil ujian jenjang SD/MI pada tahun 2019 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 rata-rata hasil ujian SD/MI 210,50 (dengan rata-rata nilai UAN 70,35), turun menjadi 210,41 (dengan rata-rata nilai UAN 70,14) pada tahun 2019. Meskipun demikian, rata-rata hasil ujian SD/MI Kabupaten Sleman tahun 2019 ini menduduki peringkat 1 se-DIY, disusul oleh Kota Yogyakarta dengan nilai 210,04. SD/MI di Kabupaten Sleman yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yang masuk 10 besar tingkat provinsi adalah SD Negeri Percobaan 3 (peringkat 2 se-DIY, SD

Muhammadiyah Pakem (peringkat 3 se-DIY), SD Muhammadiyah Sleman peringkat 4 se-DIY), SD Muhammadiyah Kadiisoka (peringkat 5 se-DIY), TK dan SD Model Sleman (peringkat 6 se-DIY), dan SD IDEA Baru (peringkat 8 se-DIY).

Selama lima tahun terakhir, jumlah sekolah negeri baik TK, SD maupun SMP, cenderung tetap dan sekolah swasta terdapat tren yang selalu meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah sekolah swasta, jumlah murid yang bersekolah di sekolah swasta juga bertambah. Tingkat pemenuhan atas kebutuhan sekolah di suatu wilayah dapat dilihat melalui rasio ketersediaan sekolah. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah per penduduk usia sekolah pada tahun 2010 penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Gambar 3. Rata-rata Nilai UAN SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sleman Tahun 2017 - 2019

Selama kurun waktu 2016-2020, rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2020, rasio ketersediaan SD/MI sebesar 55, sedangkan rasio ketersediaan sekolah menengah pertama sebesar 32. Pada tahun ajaran 2018/2019, nilai rata-rata ujian siswa SMP/MTs di Kabupaten Sleman menduduki peringkat kedua se-DIY. Berdasarkan data untuk jenjang SMP/MTs Kabupaten Sleman yang masuk sebagai bedah DIY yaitu SMPN 4 Pakem/Peringkat 2, SMPN 10 Gedean/Peringkat 4, SMPN 4 Depok/Peringkat 6 dan SMPN 1 Sleman/Peringkat 7. Selain itu, Kabupaten Sleman juga melaksanakan program peningkatan mutu sekolah dengan anggaran dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus. Namun anggaran ini belum dapat memenuhi kebutuhan rehab yang ada. Sehingga perlu disusun skala prioritas, untuk menentukan sekolah yang akan ditingkatkan lebih dahulu.

Namun, pada tahun 2020 tidak dilaksanakan ujian nasional seperti tahun sebelumnya, dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Nilai raport digunakan sebagai syarat penerimaan peserta didik baru. Sementara untuk tenaga guru yang menjadi kewenangan Kabupaten, guru negeri terdapat tren yang menurun disebabkan jumlah guru negeri yang pensiun setiap tahunnya mencapai angka ratusan. Pada tahun 2021, terdapat tambahan guru negeri melalui seleksi CPNS pada tahun 2020. Jumlah guru swasta cenderung stabil, bahkan menunjukkan tren sedikit meningkat. Untuk tenaga non guru negeri juga terdapat tren yang menurun sedangkan untuk non guru swasta cenderung tetap.

Rasio guru dan murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat seberapa cukup ketersediaan guru untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Kemudian dibandingkan dengan ukuran jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Pada tahun 2020, rasio guru dan murid SD/MI sebesar 18,00. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebanyak 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 20 siswa, sehingga rasio guru dan murid SD/MI di Kabupaten Sleman telah melampaui standar yang ditetapkan. dasar, sementara pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pemenuhan pelayanan pendidikan, pemerintah Kabupaten Sleman didukung dan dikuatkan oleh masyarakat dan swasta secara signifikan. Perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebanyak 1 (satu) orang guru SMP/MTs mengajar 32 siswa, karena itu rasio guru dan murid SMP/MTs di Kabupaten Sleman telah memenuhi standar. Perhitungan rasio itu tidak hanya terhadap guru-guru negeri (PNS) namun termasuk pula guru tidak tetap (GTT).

Tabel 3. Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

Yang perlu menjadi perhatian adalah besaran gaji guru swasta masih di bawah upah minimum, padahal guru adalah jabatan profesional yang harus bertanggung jawab dengan keahlian di bidangnya untuk mendidik dan mengajar murid yang nantinya akan menjadi generasi muda dalam membangun nusa dan bangsa.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap

penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah pada fasilitas pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD/MI pada dua tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 adalah sebesar 99,94%. APS jenjang SMP/MTs, juga mengalami penurunan, menjadi 99,58. Adapun nilai APS secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	APS SD/MI (%)	115,13	116,03	117,11	100,90	99,94
2	APS SMP/MTs (%)	115,53	112,16	114,65	106,21	99,58

Sumber : RPJMD Kabupaten Sleman, 2021

APS jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs berada di bawah angka 100, artinya bahwa ada penduduk usia sekolah yang belum tertampung di sekolah yang tersedia atau ada penduduk usia sekolah bersekolah di luar wilayah Kabupaten Sleman. Pada tahun 2019, APS menurun karena adanya regulasi zonasi pada sekolah negeri.

1. Anak Putus Sekolah

Putus sekolah adalah usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kasus putus sekolah jenjang SD ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Perkembangan Jumlah Kasus Putus Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Data tersebut merupakan data tahunan dari data pokok pendidikan, bukan data kumulatif. Berdasarkan data pokok pendidikan pada tahun 2020 tidak ada anak putus sekolah. Sementara, angka kumulatif putus sekolah dan tidak sekolah yang telah dikumpulkan melalui pendataan sebanyak 890 anak. Alasan anak putus sekolah sangat variatif dan spesifik kasus per kasus, tidak hanya ketidakmampuan secara ekonomi yang menjadi penyebab putus sekolah, antara lain yang bersangkutan merupakan anak berkebutuhan khusus, anak tidak ingin bersekolah, anak telah bekerja dan menikah, anak berhadapan dengan bantuan hukum, mengalami kekerasan, terkena dampak bencana, ada kendala akses transportasi, anak berada pada kondisi sosial dan pergaulan kurang mendukung serta anak tidak memiliki akta kelahiran.

Permasalahan Khusus Pendidikan Berdasarkan Pada Kondisi Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan menyimak dari berbagai informasi media social, maka patut diduga bahwa terdapat masalah-masalah yang mendasar dalam penyelenggaraan pembelajaran dan evaluasi pendidikan, diantaranya adalah:

1. Kualitas atau mutu (baik akademik maupun non akademik) peserta didik menurun;
2. Ketuntasan kurikulum tidak maksimal;
3. Proses pembelajaran juga tidak maksimal, karena dengan system daring (online);
4. Proses penilaian bagi peserta didik tidak bisa variatif dan di bawah standar penilaian;
5. Kendala bagi guru dalam mengikuti perkembangan TI, khusus untuk pembelajaran dan penilaian;
6. Fasilitas pendukung praktikum (khususnya SMP) sangat terbatas;
7. Lemahnya system supervise dan monitoring;
8. Timbulnya variasi manajerial sekolah akibat kondisi sumber daya masing-masing;
9. Peran orang tua peserta didik lebih dominan dalam membimbing anak-anaknya, sementara tidak memungkinkan mampu mengganti peran guru;
10. Hambatan pembiayaan bagi sebagian besar orang tua peserta didik;
11. Menurunnya peran para pemangku kepentingan dalam membantu pendidikan;

Daftar Sumber

RPJMD Kabupaten Sleman 2021

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman. (2020). Penelitian Pembelajaran pada Era Covid 2020. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman 2021